

ABSTRAK

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana diberitakan dan diketahui umum, Bupati Indramayu, Supendi, telah melakukan penyimpangan-penyimpangan keuangan negara dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan jabatannya. Tegasnya, Bupati Indramayu ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga telah melakukan tindak pidana korupsi. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajibannya sebagai penyelenggara negara, yakni selaku Bupati Indramayu, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).¹

Maka peneliti merasa terpanggil untuk melakukan Penelitian Tesis terhadap kinerja “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Kabupaten Indramayu berdasarkan Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”

Rumusan Masalah: 1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu? 2. Bagaimana model pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu? 3. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Indramayu kabupaten Indramayu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014?

Tujuan Penelitian untuk memperoleh kejelasan tentang : 1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu; 2. Model pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu; 3. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD kabupaten Indramayu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Teori yang digunakan : 1. Grand Theory: Teori Negara Hukum; 2. Middle Theory: Trias politika; 3. Applied Theory : Desentralisasi

Metode Penelitian : Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi). Metode yang dipakai penulis dalam penelitian ini juga dengan *Library Research*, yaitu penulis mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data melalui buku-buku serta sumber-sumber atau referensi yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini. Metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini juga menggunakan metode wawancara kepada beberapa anggota legislatif /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indramayu, untuk mencapai tujuan penelitian.

Kesimpulan : 1. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Indramayu terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu telah diwujudkan dalam bentuk

¹ <https://m.cnnindonesia.com>

pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati serta terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Namun, terkait pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten Indramayu tidak tampak sejelas pelaksanaan dua pengawasan sebelumnya. **2.** pengawasan internal (*internal control*) bukan eksternal (*external control*). Model pengawasan yang dijalankan adalah pengawasan *a-priori* dan *a-posteriori*; pengawasan preventif dan represif. Pengawasannya bersifat langsung dengan cara mendatangi objek yang diawasi dan tidak langsung dengan cara memeriksa beberapa dokumen terkait masalah yang diawasi. Corak pengawasannya adalah legalitas (pengawasan segi hukum) dan oportunitas (pengawasan segi kemanfaatan). **3.** Terhadap tiga pelaksanaan fungsi pengawasan ini, dua diantaranya DPRD Kabupaten Indramayu telah melaksanakan fungsi pengawasannya dengan baik dan efektif. Namun, pelaksanaan pengawasan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak tampak efektif.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE SUPERVISORY FUNCTION OF THE REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVE COUNCIL (DPRD) IN INDRAMAYU REGENCY TOWARDSTHE REGIONAL GOVERNMENT OF INDRAMAYU REGENCY

Based on the Law number 23 of 2014 concerning regional governments.

As reported and known by the public, The Regent of Indramayu, Supendi has committed financial malfeasance and did an act contrary to his position. The Regent of Indramayu was arrested by the corruption Eradication Commission (KPK) for allegedly committing corruption offenses in the air verdict, the judge stated that the deventhant's actions were in violation of their duties as a state administrator, namely as the Regent of Indramayu, as referred to in article 5 paragraphs 4 and 6 of the Republik of Indonesia Law no 28 of 1999 clean government Administration and the elimination of corruption, collusion, and Nepotism.

So the reseacher feld called to conduct a Thesis Reseach on the performance of the "Implementation of the Supervision Function of the Indramayu District DPRD towards the Indramayu District. Government based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government". Problem Formulation:

1. How is implementation of the supervisory function of the Regional People's Representative Council (DPRD) of Indramayu Regency towards the local government of Indramayu Regency?
2. What is the model of supervision carried out by the DPRD of Indramayu Regency towards the local government of Indramayu Regency?

3. How is the implementation of the supervisory function of the DPRD of Indramayu Regency based on Law Number 23 of 2014?

The purpose of the research is to obtain clarity about: 1. The Implementation of the supervisory function of the DPRD of Indramayu Regional People's Representative Council (DPRD) of Indramayu Regency towards the Regional Government of Indramayu Regency; 2. The supervisory model carried out by the DPRD of Indramayu Regency towards the Regional Government of Indramayu Regency; 3. The implementation of the supervisory function of the DPRD of Indramayu Regency based on Law Number 23 of 2014.

The theories used are: 1. Grand Theory: Rule of Law Theory; 2. Middle Theory: Separation of Powers; 3. Applied Theory: Decentralization.

Research Method: The method used in this research is content analysis. The author also used Library Research in this study, which involved conducting literature research and collecting data from books and sources related to the topic. Additionally, the author used interviews with several members of the local legislative council (DPRD) in Indramayu Regency to achieve the research objectives.

Conclusion:

1. The implementation of the oversight function by the Regional People's Representative Council (DPRD) of Indramayu Regency over the local Government of Indramayu Regency has been manifested in the form of oversight of the implementation of the Regional Regulations and Regent's Regulations, as well as oversight of the follow up to audit findings by Supreme Audit Agency. However, the oversight in the form of monitoring compliance with other relevant laws and regulations related to the governance of Indramayu Regency does not seem to be as clear as two previous oversight functions.
2. It is internal control, not external control. The supervision model being implemented is a priori and a posteriori supervision; preventive and repressive supervision. The supervision is direct by visiting the object being supervised and indirect by examining relevant documents related to the issue being supervised. The patterns of supervision are legality (legal aspect of supervision) and opportunity (benefit aspect of supervision).

In regard to these three functions of supervision, two of them have been effectively carried out by the Indramayu Regency DPRD (Regional People's Representative

Council). However, the supervision of other legal regulations related to the implementation of local government does not appear to be effective.

